

MEMBANGUN MASYARAKAT SADAR BENCANA

Sriharini

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

A. Pendahuluan

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu pola kehidupan normal masyarakat, serta menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap jiwa, harta dan struktur sosial masyarakat yang melebihi kemampuan dari masyarakat yang tertimpa bencana untuk menanggulangnya sehingga membutuhkan perlindungan dan bantuan dari pihak lain. Beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya bencana adalah kemiskinan, pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat, transisi kultural atau perubahan dalam masyarakat, proses alam (proses geologi, geomorfologis dan klimatologi), degradasi lingkungan, kurangnya kesadaran dan informasi yang ada dalam masyarakat, peristiwa perang atau kerusakan masyarakat.¹

¹ UNDP/c, *Tinjauan Umum Manajemen Bencana*, (UNDRO : Program Pelatihan Manajemen Bencana, 1992), hlm. 16-19. Lihat pula Sutikno, *Kebijakan Pengelolaan Bencana di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam acara Diktat TOT

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik yang saling bertabrakan, terletak pada the ring of fire, terletak di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada lintang rendah di daerah iklim tropika basah, dihuni oleh berbagai ras dan suku bangsa dengan karakter yang berbeda-beda, dapat dikatakan sebagai negeri dengan “seribu bencana”.² Pada tahun 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke tujuh negara yang paling rawan di dunia.³

Indonesia seakan akan tidak pernah terlepas dari kejadian bencana. Berbagai bencana datang silih berganti, dan menimbulkan korban dan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Setiap tahun tercatat ribuan orang meninggal dunia, luka luka, dan mengungsi dari tempat tinggalnya, serta banyak lagi kerugian-kerugian lain yang diakibatkan oleh bencana. Berbagai fasilitas umum dan hasil hasil pembangunan yang dilaksanakan selama bertahun tahun roboh dan rusak sehingga memerlukan biaya perbaikan yang cukup banyak. Sejumlah bencana alam tragis yang menghantam Indonesia selama beberapa tahun terakhir seperti gempa bumi, letusan gunung merapi, kekeringan, banjir, tanah longsor, stunami tidak hanya membawa kesedihan karena kehilangan nyawa dan harta benda, tetapi meninggalkan trauma yang luar biasa pada orang-orang yang terkena bencana.

Masyarakat Indonesia sangat penting untuk mengetahui, memahami dan menyadari bahwa bumi tempat untuk berpijak sehari hari merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana,

kebencanaan, diselenggarakan oleh Badan Linmas Propinsi Papua dan PSBA UGM, di Yogyakarta 8-19 Agustus 2003, hlm. 4-6.

² Sunarto, *Konsep-Konsep Kebencanaan dan Penanggulangan Bencana*. (Makalah disampaikan pada Pelatihan Sistem Informasi Geografis Untuk Penanggulangan Bencana, diselenggarakan oleh Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Depsos RI bekerja sama dengan Pusat Studi Bencana (PSBA) UGM, di Yogyakarta 2-11 Oktober., 2006).

³ Suprayoga Hadi, Materi Sambutan Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada acara *Workshop Bencana 2008 “Strategi Pengurangan Risiko Bencana Kebumihan”*, (LPPM UGM, Hilink Project, Fakultas Teknik UGM, Agustus 2008).

sehingga bencana bisa terjadi kapan saja dan di wilayah mana saja. Manusia tidak bisa memprediksi dengan tepat kapan dan dimana terjadinya. Namun demikian perlu disadari bahwa bencana bisa dikelola sehingga dampaknya dapat dikendalikan. Kegiatan pengelolaan hal hal yang berkaitan dengan bencana, baik pada sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana dengan tujuan menghindari terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila telah terjadi suatu bencana disebut dengan istilah manajemen bencana.

Dampak besar dari rangkaian bencana di Indonesia akhir akhir ini memperlihatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat lokal, untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah membangun masyarakat Indonesia “sadar bencana”. Tulisan berikut ini mencoba membahas tentang bagaimana membangun masyarakat sadar bencana sebagai upaya mengurangi resiko dan dampak bencana yang selalu mengancam kehidupan manusia.

B. Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Bencana seringkali menjadi sesuatu yang “menakutkan” baik bagi pemerintah ataupun seluruh masyarakat, karena bencana selalu membuat dan memaksa pemerintah menjadi repot karena harus melaksanakan tanggap darurat bencana, pemulihan dan pembangunan yang menghabiskan anggaran yang cukup banyak. Peristiwa bencana juga merugikan masyarakat karena dapat merusak dan mengganggu kehidupannya. Hal demikian menurut Carter ⁴, karena bencana cenderung merefleksikan karakteristik sebagai berikut : gangguan terhadap pola kehidupan normal. Gangguan ini biasanya hebat, terjadi tiba-tiba, tidak disangka dan wilayah cakupannya cukup luas; berdampak pada manusia seperti kehilangan jiwa, luka-luka, penderitaan dan gangguan kesehatan; berdampak pada struktur sosial seperti kerusakan sistem pemerintahan, bangunan, komunikasi dan pelayanan

⁴ W Nick Carter, *Disaster Management, A Disaster Manager's Handbook*, (Manila : ADB. 1991), hlm. xxii - xxiii.

publik; komunitas memerlukan perlindungan, makanan, pakaian, bantuan medis dan bantuan sosial.

Bencana yang mengganggu dan merugikan manusia baik yang disebabkan karena faktor alam, karena faktor perbuatan manusia ataupun bencana karena kombinasi antara faktor alam dan ulah tangan manusia, perlu dikelola atau dimanajemen dengan baik agar masyarakat dapat menghindari terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila telah terjadi suatu bencana. Kegiatan pengelolaan inilah yang seringkali disebut dengan manajemen bencana.

Banyak para ahli yang mendefinisikan istilah manajemen bencana. Dari sbeberapa definisi yang ada, manajemen bencana dapat dipahami sebagai sekumpulan kebijakan untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan bencana pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan (preventif), pengurangan (mitigasi), kesiapsiagaan (preparednes), tanggap darurat (response), pemulihan (recovery) dan rekonstruksi (development) melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna dengan tujuan untuk menghindari terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila telah terjadi suatu bencana.⁵

Belajar dari pengalaman penanganan bencana di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, penanggulangan bencana di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup progressif, yang ditandai dengan diluncurkannya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana, dan diundangkannya Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.⁶

⁵ Lihat Sriharini, *Manajemen Pasca Bencana Alam : Studi tentang Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY*, (Disertasi : 2009), hlm.32.

⁶ Banu Subagyo, *Membangun Masyarakat dan Pemerintah yang Peka, Tanggap dan Tangguh terhadap Bencana*, (Makalah disampaikan dalam Acara Workshop Gempa Bumi Nasional 2007, tentang Perumusan Regulasi Daerah Untuk Pengurangan Risiko Bencana, di UGM Yogyakarta, Tanggal 1 Nopember 2007), hlm. 5.

Peluncuran Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN PRB) tahun 2006-2010 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB), yang diresmikan pada bulan Januari 2007, dilaksanakan sebagai kelanjutan dari resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1999 yang menyerukan kepada pemerintah di masing-masing negara untuk menjaga dan memperkuat realisasi rencana aksi pengurangan resiko bencana nasional untuk mendukung dan menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut dalam Hyogo Framework For Action 2005-2015 juga ditekankan bagi seluruh negara di dunia untuk menyusun mekanisme terpadu pengurangan resiko bencana yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai.⁷

Aksi Beijing dirumuskan dalam Konferensi Asia tentang pengurangan risiko bencana tanggal 27-29 September 2005 di Beijing (Cina). Sementara Deklarasi dan Kerangka Kerja Aksi Hyogo dirumuskan pada kesempatan konferensi pengurangan risiko bencana sedunia di Kobe negara Jepang, pada tanggal 18 - 22 Januari 2005, dalam suasana duka setelah kejadian bencana tsunami di Jepang.⁸ Kerangka aksi Hyogo merupakan tekad dan program kerja masyarakat sedunia dalam rangka pengurangan resiko bencana 2005-2015, dengan membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana.

Perkembangan progresif penanggulangan bencana di Indonesia, juga ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan hadirnya Undang-Undang tersebut, terjadi perubahan paradigmatis dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Beberapa perubahan paradigma tersebut

⁷ Lihat buku *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2010*, (Jakarta : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, 2006), hlm. 1.

⁸ Theresia Wuryanti (Penj.), 2006. *Kerangka Aksi Hyogo, Pengurangan Risiko Bencana 2005-2015 Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana*, (Jakarta : Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), 2006), hlm.v.

antara lain adalah : penanggulangan bencana pada paradigma lama bersifat reaktif, parsial dan sektoral, berubah menjadi proaktif dan holistik. Dari insidental menjadi berencana, berkesinambungan, sejak pra bencana, tanggap darurat sampai dengan pasca bencana (komprehensif). Penanggulangan bencana pada paradigma baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan. (terintegrasi dengan perencanaan kegiatan pembangunan). Penanggulangan bencana pada paradigma lama untuk sekedar memulihkan keadaan, dan dalam paradigma baru berubah menjadi kehidupan pasca bencana yang lebih baik (meningkat) dari pada sebelumnya. Ada sanksi pidana dan denda bagi penyelenggara pembangunan yang mempunyai risiko tinggi dan menimbulkan bencana (baik karena kelalaian ataupun kesengajaan). Pelaku penanggulangan bencana bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah baik yang ada di wilayah setempat maupun dari luar.⁹

Kehadiran Undang Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana dan berbagai peraturan turunannya termasuk tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telah menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahapan pra bencana, tanggap darurat sampai pemulihan dan pembangunan pasca bencana. Selain adanya payung hukum yang kuat, hal lain yang diperlukan untuk mendukung suksesnya pengurangan risiko bencana di Indonesia adalah adanya masyarakat yang sadar bencana. Menjadi tugas pemerintah dan semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, pemahaman, ketrampilan serta peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan atau disebut dengan istilah "sadar bencana". Dalam upaya membangun masyarakat atau komunitas yang sadar bencana ini, pendidikan kebencanaan menjadi pintu masuk yang cukup penting dan strategis. Dengan pendidikan kebencanaan, diharapkan cita-cita bersama masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia dapat terwujud, sehingga dapat menikmati hidup lebih aman, tenteram dan sejahtera.

⁹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang *Penanggulangan Bencana*.

C. Pendidikan Kebencanaan: Sebuah Upaya Mengembangkan Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama masyarakat internasional untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana, di Indonesia telah membentuk Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN PB) yang berisi lima prioritas aksi yang harus dilakukan, yaitu, (1). Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya harus dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat. (2). mengidentifikasi, mengkaji risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini. (3). Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan. (4). Mengurangi cakupan risiko bencana. (5). Meningkatkan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan, agar tanggapan yang dilakukan lebih efektif.¹⁰

Berdasarkan lima prioritas pengurangan risiko bencana yang tertuang dalam rencana aksi nasional tersebut dapat dipahami bahwa pengetahuan dan pendidikan menjadi pintu masuk yang penting dan strategis untuk membangun budaya masyarakat yang peduli pada hal hal yang berkaitan dengan persoalan kebencanaan. Gambaran masyarakat yang mengetahui, memahami dan peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan bencana inilah yang kemudian penulis mendefinisikan sebagai “masyarakat sadar bencana”. Pendidikan kebencanaan merupakan suatu upaya menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan bencana, dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan kepedulian masyarakat agar memiliki kesadaran untuk bersikap dan melakukan adaptasi, di wilayah yang rawan bencana dengan sebaik baiknya, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam meminimalisir terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila terjadi bencana.

¹⁰ Lihat buku *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana*, hlm. IV – 2.

Adapun rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana melalui pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan, terdiri dari empat hal penting¹¹, yaitu :

Pertama, Manajemen informasi dan pertukaran informasi. Dengan bentuk kegiatan : Menyediakan informasi resiko dan pilihan perlindungan bencana yang mudah dipahami, terutama pada masyarakat pada daerah beresiko tinggi; Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat berwenang, dan perencana antar sektor dan wilayah, dan menyusun atau memperkuat prosedur untuk memanfaatkan keahlian dalam menyusun rencana pengurangan resiko bencana; Meningkatkan dialog dan kerjasama antara para ilmuwan dan praktisi di bidang pengurangan resiko bencana; Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan informasi terkini, komunikasi dan teknologi; untuk mendukung upaya pengurangan resiko bencana; Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventaris, dan sistem pertukaran informasi skala lokal, nasional, regional dan internasional; Institusi yang berhubungan dengan pengembangan perkotaan harus menyediakan informasi mengenai pemilihan konstruksi, pemanfaatan lahan atau jual beli tanah; Memperbaharui dan menyebarluaskan terminologi standar internasional tentang pengurangan resiko bencana.

Kedua, Pendidikan dan Pelatihan, dengan cara : Memasukkan unsur pengetahuan pengurangan resiko bencana pada kurikulum sekolah yang relevan; Mempelopori implementasi pengkajian resiko dan program-program kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang lebih tinggi; Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak bencana di sekolah-sekolah; Mengembangkan program-program pelatihan dan pembelajaran pengurangan resiko bencana pada sektor tertentu (perencana pembangunan, penanggungjawab keadaan darurat, pemerintah daerah); Mempelopori inisiatif pelatihan berbasis masyarakat, ditekankan pada aturan-aturan bagi sukarelawan; Menyediakan peluang akses pelatihan dan pendidikan yang sama bagi perempuan dan konstituen yang rentan lainnya.

¹¹ Lihat buku *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana*, hlm. IV-6.

Ketiga, Penelitian, dengan kegiatan : Membangun metode lanjutan untuk pengkajian prediksi bencana multi resiko dan analisis sosio-ekonomi cost-benefit dalam kegiatan pengurangan resiko bencana,; Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi, kajian, dan model dari pengkajian kerentanan, serta dampak bencana geologis, cuaca, iklim, dan air. Keempat, Kepedulian Publik : Memperkuat peran media untuk merangsang budaya kesiapsiagaan terhadap bencana dan keterlibatan masyarakat.

Menurut pendapat Tim Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM¹² pendidikan kebencanaan yang merupakan bagian dari lima agenda besar rencana aksi nasional ini menjadi jembatan yang sangat penting dalam membangun moral manusia agar dalam kehidupan menjunjung tinggi nilai etika lingkungan, serta mau bertindak dan berpartisipasi dalam mencari jawab yang fundamental tentang penanggulangan bencana. Pengembangan kesadaran masyarakat melalui pendidikan kebencanaan ini menjadi penting dalam upaya membekali masyarakat dalam menjalani hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Dengan bekal kesadaran yang ada, masyarakat dapat bertindak, berpartisipasi aktif dan melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana sejak dini.

Dalam implementasinya,¹³ pendidikan kebencanaan ini secara garis besar dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Implementasi program pendidikan ini, dapat bekerja sama dengan masyarakat atau kelompok kelompok tertentu dalam masyarakat seperti pimpinan agama, tokoh masyarakat, aktifis perempuan, pemuda, wartawan, atau organisasi masyarakat. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam

¹² Tim Sosialisasi Mitigasi Bencana PSBA UGM, *Laporan Akhir Mitigasi Bencana Gempa bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa*, Kerjasama Departemen Sosial RI dengan PSBA UGM, (tt ; 2007), hlm. 12.

¹³ Upaya mengembangkan masyarakat sadar bencana memiliki relevansi dengan upaya penyadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. (Lihat Sriharini, Pengembangan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan, dalam Jurnal PMI Vol IV, Nomor 1, September 2006, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah, 2006), hlm. 96.

mengelola hal hal yang berkaitan dengan bencana ini dikenal dengan manajemen bencana berbasis masyarakat. Implementasi manajemen bencana berbasis masyarakat juga merupakan salah satu pilar penting guna mensukseskan progam pendidikan kebencanaan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, akan menambah pengalaman, pemahaman, ketrampilan, kepedulian, sekaligus membangun kesadaran mereka dalam merespon hal hal yang berkait dengan kebencanaan.

Beberapa aspek yang dapat dipakai sebagai landasan untuk pengembangan kesadaran masyarakat antara lain ¹⁴: Dampak bencana pada masyarakat; Cara terbaik untuk penanganan awal dampak tersebut baik oleh perorangan, keluarga sampai oleh RT/RW; Bagaimana masyarakat dapat membantu warga yang terkena musibah; Apa yang sudah disiapkan oleh pihak kompeten (aparap Pemerintah) guna membantu daerah yang terkena bencana; Bagaimana rakyat dapat berperan secara aktif dalam komunikasi dan peringatan dini; Bagaimana desa dapat melakukan improvisasi untuk tempat perlindungan dan memperoleh kebutuhan pokok selama masa darurat (sebelum bantuan sampai); Peranan dan fungsi PMI dalam pelbagai kegiatan sesuai siklus bencana; Apa yang dapat diharapkan masyarakat setempat dari organisasi/fasilitas PMI dalam situasi bencana; Apa yang diharapkan PMI dari masyarakat/LSM dalam rangka pelaksanaan peran kemanusiaan itu.

Di samping aspek aspek yang telah disebutkan di depan, masih ada aspek lain yang perlu digunakan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat. Sebagai upaya untuk mengembangkan kesadaran masyarakat terkait dengan bencana, pendidikan kebencanaan memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni seputar masalah bencana (apa yang dimaksud bencana, karakter bencana, faktor penyebab bencana, dampak bencana, peta rawan bencana dan sebagainya), serta bagaimana mengelola bencana (baik pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang menyangkut pencegahan, pengurangan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan).

¹⁴ *Pedoman Penanggulangan Bencana*, (Jakarta : Markas Besar PMI, 1998), hlm. 33-34.

Dengan demikian ruang lingkup kajian dalam mengembangkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan kebencanaan meliputi persoalan yang sangat luas dan komprehensif. Oleh karena luasnya ruang lingkup ini, untuk membahasnya secara detail diperlukan kajian yang lebih khusus.

Adapun media pendidikan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat antara lain ¹⁵: Radio/Kaset.; Papan pengumuman/Poster/Bill board; Pengembangan logo/vignet/pesan pesan pendek yang dapat disebar luaskan pada pelbagai kejadian/tempat seperti lewat TV/Kaos/ selebaran/kantong plastik; Cek Ber/Kartun dan mass-media cetak; Film; Musyawarah desa, Rapat RT/RW; Upaya Humas PMI dalam pengerahan dana ; dan Ceramah Diskusi.

Selain pemanfaatan media yang ada di sekitar masyarakat, pengalaman yang dilakukan oleh tim Palang Merah Indonesia dalam upaya pengembangan kesadaran masyarakat ini, juga melakukan terobosan lain dengan memadukan program programnya secara formal dengan Program RRI/Program TVRI; Mass-media Cetak (Penerbitan/koran/majalah); Program Pemerintah yang sudah baku (PKK, Karang Taruna/ Posyandu/ Penerangan rakyat); Program sekolah yang sangat luas dan dapat bermanfaat secara berkesinambungan serta dikembangkan dengan program Pembinaan PMR; Program Pramuka, LSM, LPSM.

Mengenai sumber untuk pengembangan materi program peningkatan kesadaran masyarakat antara lain : Kantor Kepala Daerah Tk.I/II; Instansi Pemerintah RI (Kanwil/Kandep yang bersangkutan); BAKORNAS; Lembaga Non Departemen (LIPI, dan sebagainya); Perpustakaan Nasional/Perguruan Tinggi; Gerakan Pramuka, YIS/Gerakan PKK ; PMI; Sumber luar negeri (PBB/WHO/FAO, IFRC) .

Pendidikan kebencanaan sebagai upaya untuk membangun masyarakat sadar bencana memiliki dimensi yang cukup luas. Dalam mengimplementasikannya diperlukan metode, media dan sumber untuk pengembangan materi yang dapat dilakukan

¹⁵ Lihat buku *Pedoman Penanggulangan Bencana*, hlm. 34-35.

dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki misi yang relevan.

D. Penutup

Negara Indonesia dikenal dengan negeri seribu bencana. Berbagai macam jenis bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, atau faktor perbuatan manusia, atau karena faktor keduanya, datang silih berganti melanda Indonesia, seperti gempa bumi, letusan gunung merapi, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan. Belajar dari pengalaman penanganan bencana di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, penanggulangan bencana di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup progressif, yang ditandai dengan diluncurkannya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN PB), dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Salah satu agenda penting yang perlu diperhatikan dalam menyikapi kejadian bencana yang datang bertubi-tubi di Indonesia adalah menyiapkan dan membangun masyarakat sadar bencana. Yang dimaksud dengan masyarakat sadar bencana adalah : kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan kepedulian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, sehingga memiliki kesadaran untuk bersikap dan melakukan adaptasi di wilayah yang rawan bencana dengan sebaik-baiknya, dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam meminimalisir terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila terjadi bencana. Dalam upaya membangun masyarakat atau komunitas yang sadar bencana ini, pendidikan kebencanaan menjadi pintu masuk yang cukup penting dan strategis. Pendidikan kebencanaan dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

Pendidikan kebencanaan sebagai upaya untuk membangun masyarakat sadar bencana memiliki dimensi kajian yang cukup luas, dan dalam implementasinya perlu memperhatikan metode, media yang sesuai dan perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain yang memiliki misi yang sama, untuk menuju terwujudnya masyarakat partisipatif dalam mengelola bencana. Dengan

pendidikan kebencanaan, diharapkan cita-cita bersama masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia dapat terwujud, sehingga dapat menikmati hidup lebih aman, tenteram dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2010, Jakarta : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
- Anonim, 1998. Pedoman Penanggulangan Bencana, Jakarta : Markas Besar PMI.
- Carter, W Nick, 1991. Disaster Management, A Disaster Manager's Handbook, Manila : ADB.
- Hadi, Suprayoga, 2008. Materi Sambutan Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada acara Workshop Bencana 2008 "Strategi Pengurangan Risiko Bencana Kebumihan", (LPPM UGM, Hilink Project, Fakultas Teknik UGM, Agustus 2008).
- Sriharini, 2006. Pengembangan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan, dalam Jurnal PMI Vol IV, Nomor 1, September 2006, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah.
- Sriharini, 2009. Manajemen Pasca Bencana Alam : Studi tentang Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY, Disertasi
- Subagyo, Banu, 2007. Membangun Masyarakat dan Pemerintah Yang Peka, Tanggap dan Tangguh Terhadap Bencana. Makalah disampaikan pada Lokakarya Gempa Bumi Nasional 2007 tentang Perumusan Regulasi Daerah Untuk Pengurangan Resiko Bencana. Diselenggarakan oleh Fakultas Teknik UGM - LPPM UGM -High-Link JICA Project. di Yogyakarta, 1 Nopember.
- Sunarto, 2006. Konsep-Konsep Kebencanaan dan Penanggulangan Bencana, Makalah disampaikan pada Pelatihan Sistem Informasi Geografis Untuk Penanggulang-

an Bencana, diselenggarakan oleh Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Depsos RI bekerja sama dengan Pusat Studi Bencana (PSBA) UGM, di Yogyakarta 2-11 Oktober.

- Sutikno, 2003. Kebijakan Pengelolaan Bencana di Indonesia. Makalah disampaikan dalam acara Diktat TOT kebencanaan, diselenggarakan oleh Badan Linmas Propinsi Papua dan PSBA UGM, di Yogyakarta 8-19 Agustus.
- Tim Sosialisasi Mitigasi Bencana PSBA UGM, 2007. Laporan Akhir Mitigasi Bencana Gempa bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa, Kerjasama Departemen Sosial RI dengan PSBA UGM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana.
- UNDP/c, 1992. Tinjauan Umum Manajemen Bencana, UNDR0 : Program Pelatihan Manajemen Bencana.
- Wuryanti, Theresia (Penj.), 2006. Kerangka Aksi Hyogo, Pengurangan Risiko Bencana 2005-2015 Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana, Jakarta : Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI).